

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Rifdah Aisyah ^{1*}, Rosy Armaini ², Yevi Dwitayanti ³

^{1*,2,3} Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia.

Email: rifdahaisyah8@gmail.com ^{1*}, rosyarmaini@polsri.ac.id ², yevi_dwitayanti@polsri.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 9 Juli 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 November 2025; Diterima 10 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Aisyah, R., Armaini, R., & Dwitayanti, Y. (2026). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 37-46. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.4848>.

Abstrak

Penelitian ini bermaksud sebagai uji bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Belanja Modal, serta Dana Perimbangan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder dikumpulkan dari Pelaporan Pemeriksaan BPK RI. Temuan ini meliputi secara menyeluruh kabupaten maupun kota di provinsi tersebut, melalui penggunaan metode sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis melalui penggunaan teknik regresi data panel. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Ukuran Pemerintah Daerah berdampak positif secara signifikan pada kinerja keuangan, *Leverage* juga memiliki dampak positif secara signifikan pada kinerja keuangan, Belanja Modal tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, serta Dana Perimbangan berdampak negatif yang signifikan pada kinerja keuangan. Secara bersamaan, keempat variabel independen tersebut memberikan pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Ukuran Pemerintah Daerah; *Leverage*; Belanja Modal; Dana Perimbangan; Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to explore the impact of Local Government Size, *Leverage*, Capital Expenditure, and Balance Fund on the Financial Performance of Regency and City Governments within South Sumatra Province. The analysis is based on secondary data sourced from audit reports issued by the BPK RI. The study included all districts and cities within the province, employing a saturated sampling method. Data were gathered through documentation and analyzed using panel data regression techniques. The results revealed that Local Government Size significantly and positively affects financial performance, while *Leverage* also shows a positive association. In contrast, Capital Expenditure demonstrates no measurable influence, and Balance Fund exhibits a significant negative effect. Taken together, these four independent variables collectively contribute a meaningful impact on the financial performance of local government.

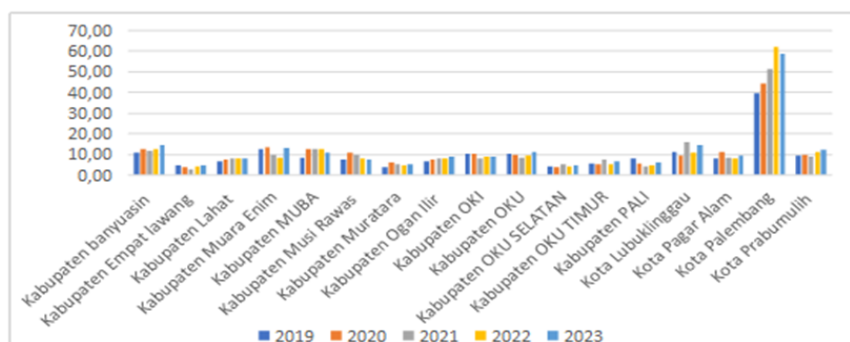
Keyword: Local Government Size; *Leverage*; Capital Expenditure; Balance Fund; Local Government Financial Performance.

RESEARCH ARTICLE

1. Pendahuluan

Indonesia melaksanakan otonomi daerah yang mana diatur dalam UU No. 22/1999 mengenai “Pemerintahan Daerah,” yang mana diperbarui melalui UU No. 33/2004 mengenai perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat serta Daerah. Peraturan ini memberi hak, tanggung jawab, maupun wewenang yang luas kepada pemerintah kabupaten dan kota agar mengatur pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan secara mandiri. Selain itu, UU 23/2014 meningkatkan kewenangan daerah dalam pengelolaan urusan tertentu, kecuali yang dikelola secara eksklusif oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas untuk memastikan bahwasanya tata kelola pemerintahan selaras dengan kepentingan nasional dan secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah diwujudkan melalui pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar penilaian kinerja. Kewajiban penyusunan laporan keuangan tertuang pada UU No. 17 Tahun 2003 serta UU No. 23 Tahun 2014. Sesuai PP No. 71 Tahun 2010, pelaporan keuangan pemerintah daerah penyusunan nya berlandaskan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disampaikan tepat waktu.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat capaian pengelolaan penerimaan dan belanja dalam satu periode anggaran (Susanto, 2019). Masyarakat menuntut pertanggungjawaban kinerja yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah. Pengukuran kinerja berperan penting untuk menilai pencapaian strategi, mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Febriansyah, 2019). Selain itu, pengukuran kinerja keuangan juga mendukung pengambilan keputusan yang tepat, mendorong perbaikan kinerja, dan mewujudkan akuntabilitas publik (Millenia, 2022). Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dari kemampuan menyediakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan yang dibiayai secara mandiri. Namun, mandiri nya tingkat fiskal kabupaten ataupun kota Provinsi Sumatera Selatan terbilang rendah, dengan tingginya kebergantungan kepada dana transfer dari pusat dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Meilanda dkk,2023). Berdasarkan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kota atau Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, tingkat bergantung pada dana transfer pusat masih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (bps.go.id, 2023). Kondisi ini menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal serta ketimpangan pengelolaan keuangan antar kabupaten/kota di wilayah tersebut. Seperti terlihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah

Berlandaskan (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2019 hingga 2023, hasil evaluasi menunjukkan bahwasanya kinerja keuangan belum menunjukkan pemerataan antar daerah. Kota Palembang berada di tingkat kemandirian fiskal tertinggi dengan persentase melebihi 50% . Sebaliknya, Kabupaten Empat Lawang menjadi wilayah dengan tingkat kemandirian paling rendah, yakni kurang dari 5%. Kondisi ini menggambarkan bahwasanya pemerintah kota ataupun kabupaten Provinsi Sumatera Selatan kondisi kinerja keuangan berada di angka rendah bahkan belum merata, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

RESEARCH ARTICLE

Beberapa peneliti terdahulu menemukan bahwasanya kinerja keuangan Pemda dipicu dari adanya berbagai faktor, di antaranya: Ukuran pemerintah daerah, *leverage*, belanja modal dan dana perimbangan (Novita & Arza, 2024), (Aulia & Rahmawaty, 2020), (Julianti dkk, 2024) dan (Pangestu, 2023). Ukuran pemerintah daerah merefleksikan sejauh mana cakupan pengelolaan yang dilaksanakan pemerintah daerah, yang secara umum dapat diidentifikasi melalui besarnya total kepemilikan aset dan dikelola oleh pemerintahan. Pemerintah daerah berukuran besar umumnya memiliki kemudahan erasional dan pelayanan publik yang lebih optimal (Aulia & Rahmawaty, 2020). Sejahter mana pembiayaan aset daerah oleh utang karena pembiayaan daerah tidak disanggupi dirinya sendiri dengan modal sendiri dikenal sebagai *leverage* (Salsabilla & Rahayu, 2021). Pembelian aset tetap dan sumber daya lainnya yang akan digunakan melebihi satu tahun disebut sebagai belanja modal. Khususnya di bidang keuangan daerah, alokasi belanja modal yang efisien mampu membantu pada peningkatan otonomi daerah dalam membantu dan pembiayaan proyek-proyek daerah. Dana APBN yang diperuntukkan bagi pelaksanaan desentralisasi dikenal sebagai dana perimbangan. Kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan program-programnya meningkat seiring dengan besarnya dana perimbangan (Dasmir *et al.*, 2020). Akan tetapi, Siregar (2020) berpendapat bahwasanya bergantung secara terus menerus terhadap dana ini justru dapat melemahkan kemandirian dan gagasan otonomi daerah. Perbedaan terlihat antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terutama terkait faktor-faktor yang diteliti. Dana perimbangan, PAD, belanja modal, maupun ukuran Pemda di Provinsi Sumatera Utara merupakan berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian sebelumnya. Sementara itu, faktor ukuran pemerintah daerah, *leverage*, belanja modal, serta dana perimbangan pada pemerintah kota maupun kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan untuk jangka waktu 2019-2023 menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini. Para peneliti mengevaluasi kembali elemen pengaruh dari kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakannya ada temuan yang berbeda dengan studi sebelumnya. “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten ataupun Kota di Provinsi Sumatera Selatan” merupakan judul dari penelitian ini.

2. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam pemerintahan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dalam UU No. 33/2004, yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya untuk kemajuan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah ukuran pemerintah daerah, *leverage*, belanja modal, dan dana perimbangan (Novita & Arza, 2024; Aulia & Rahmawaty, 2020). Ukuran pemerintah daerah, yang sering diukur berdasarkan total aset yang dimiliki, menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah yang lebih besar biasanya memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik (Aulia & Rahmawaty, 2020). *Leverage*, atau penggunaan utang untuk membiayai kegiatan daerah, juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kinerja keuangan. Pengelolaan utang yang optimal dapat memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan tanpa tergantung sepenuhnya pada pendapatan asli daerah (PAD) (Salsabilla & Rahayu, 2021). Namun, penelitian oleh Siregar (2020) memperingatkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada utang dapat mempengaruhi kemandirian fiskal dan stabilitas keuangan daerah. Di sisi lain, belanja modal, yang mencakup pengeluaran untuk aset tetap dan proyek jangka panjang, ternyata memiliki dampak yang lebih variatif. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Meilanda *et al.* (2023) dan Pangestu (2023), menunjukkan bahwa belanja modal tidak selalu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan, seringkali disebabkan oleh perencanaan dan pengelolaan yang tidak optimal.

RESEARCH ARTICLE

Dana perimbangan, yang merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai berbagai program desentralisasi, juga telah banyak dibahas dalam literatur. Beberapa studi, termasuk yang dilakukan oleh Pangestu (2023) dan Putri dkk. (2023), menemukan bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan dapat memperlemah kemandirian fiskal daerah dan mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun begitu, ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa dana perimbangan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah jika dikelola dengan baik (Maulina *et al.*, 2021; Riani & Hrp, 2022). Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ukuran pemerintah daerah, leverage, belanja modal, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, dampak masing-masing faktor dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi spesifik daerah dan bagaimana masing-masing variabel tersebut dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja keuangan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus pada kabupaten dan kota dalam periode 2019–2023.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Subjek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2024, dengan jumlah populasi sebanyak 87 perusahaan. Kriteria pemilihan sampel mencakup perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan sustainability report secara berturut-turut selama periode tersebut, serta menggunakan indeks Global Reporting Initiative (GRI) dalam penyusunannya. Dari kriteria tersebut, diperoleh 24 perusahaan yang memenuhi syarat, menghasilkan total data observasi sebanyak 96. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan tahunan dan sustainability report yang dipublikasikan di situs resmi BEI dan masing-masing perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang environmental disclosure, social disclosure, governance disclosure, dan ukuran perusahaan (firm size), yang selanjutnya dianalisis. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu kinerja perusahaan yang diproyeksikan menggunakan rasio Tobin's Q. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model, termasuk uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Hasil analisis diolah menggunakan aplikasi Eviews 12.0 untuk mendapatkan estimasi pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel terhadap kinerja perusahaan.

Tabel 1. Operasional variable

Variabel	Definisi	Indikator Variabel	Skala
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	Ukuran (size) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan besar kecilnya pemerintah daerah yang dapat dilihat dari total aset pemerintah daerah. (Nugraheni & Adi 2020)	(Ln = total Aset Pemerintah Daerah)	Rasio
Leverage (X2)	Leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya hutang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. (Sesotyaningtyas, 2012)	$Leverage = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Ekuitas}$	Rasio
Belanja Modal (X3)	Belanja modal adalah belanja yang mencakup pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau penambahan nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP)	Realisasi Belanja Modal	Rasio

RESEARCH ARTICLE

Dana perimbangan (X4)	Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah)	$\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total pendapatan}}$	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kinerja keuangan adalah hasil atau keluaran dari kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai berkaitan dengan penggunaan anggaran, yang dapat diukur dari segi kuantitas dan kualitas.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat/provinsi \& pinjaman}} \times 100\%$	Rasio

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Tabel 2. Hasil statistik deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.110473	28.94889	0.029900	26.77545	0.712353
Median	0.086739	28.81980	0.015573	26.77514	0.712681
Maximum	0.621921	30.54618	0.225611	28.71801	0.915185
Minimum	0.029010	25.42092	0.002057	25.84862	0.427504
Std. Dev.	0.107426	0.646836	0.035217	0.512594	0.087616
Skewness	3.515725	-1.055940	2.688915	0.795480	-0.596749
Kurtosis	15.12757	12.85679	13.24266	4.239443	4.686364
Jarque-Bera Probability	696.0053 0.000000	359.8909 0.000000	473.9926 0.000000	14.40529 0.000745	15.11675 0.000522
Sum	9.390235	2460.656	2.541500	2275.913	60.54997
Sum Sq. Dev.	0.969381	35.14535	0.104183	22.07122	0.644829
Observations	85	85	85	85	85

Diperlihatkan data pada tabel di atas nilai rata-rata (*mean*), median, maksimum, dan minimum dari setiap variabel yang dikaji. Berikut penjelasan rinci hasil analisis deskriptif di setiap variabel: Hasil analisis deskriptif variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1) untuk kota atau kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019–2023 menunjukkan rata-rata sebesar 28,94889. Nilai tertinggi dicapai oleh Kota Palembang pada tahun 2020, yakni sebesar 30,54618, sedangkan nilai terendah diperoleh Kota Pagaralam sebesar 25,42092, dengan deviasi standar (*standard deviation*) 0,646836. Variabel *Leverage* (X2) memiliki nilai rata-rata 0,029900. *Leverage* tertinggi tercatat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan nilai 0,225611, sementara yang terendah terdapat di Kabupaten Muara Enim sebesar 0,002057, serta deviasi standar (*standard deviation*) 0,035217. Pada 41dalam41e Belanja Modal (X3), rata-rata belanja modal 41dalam41e adalah 26,77545. Nilai tertinggi dicapai oleh Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 sebesar 28,71801, sedangkan nilai median terdapat pada Kota Prabumulih tahun 2022 sebesar 25,48462, dengan deviasi standar (*standard deviation*) 0,512594. Dana Perimbangan (X4) memiliki nilai rata-rata 0,712353. Nilai tertinggi tercatat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,915185, sedangkan nilai terendah diperoleh Kota Palembang pada tahun 2022 sebesar 0,427504, dengan deviasi standar (*standard deviation*) 0,087616. Terakhir, 41dalam41e Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) menunjukkan rata-rata 0,110473. Nilai kinerja keuangan tertinggi dicapai oleh Kota Palembang pada tahun 2022 sebesar 0,621921, sedangkan nilai terendah diperoleh Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2021 sebesar 0,029010, dengan deviasi standar (*standard deviation*) 0,107426.

RESEARCH ARTICLE

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah penentuan model regresi linier berganda yang tepat, yakni Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model* / FEM), tahapan berikutnya adalah melaksanakan pengujian asumsi klasik. Uji ini mencakup beberapa pengujian, di antaranya uji multikolinearitas (*multicollinearity*), normalitas (*normality*), heteroskedastisitas (*heteroscedasticity*), serta autokorelasi (*autocorrelation*).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.742955	44606.86	NA
X1	1.753381	41976.70	1.636254
X2	0.051794	1.810427	1.040429
X3	2.257976	51949.24	1.499293
X4	0.009581	80.31052	1.197344

Nilai *centered VIF* yang tercantum dalam tabel menunjukkan bahwasanya X1 memiliki nilai 1,636254, X2 sebesar 1,040429, X3 1,499293, dan X4 1,197344. Sehingga seluruh nilai *VIF* di bawah 10, didapati simpulan bahwasanya tidak terdapat *multikolinearitas* antara beberapa variabel independen tersebut.

4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel tersebut, memperlihatkan bahwasanya nilai *Prob. Chi-Square* pada *ObsR-squared** senilai 0,0600. Nilai ini melampaui 0,05, jadi didapati simpulan bahwasanya *heteroskedastisitas* tidak terjadi pada model regresi.

4.1.3 Persamaan Regresi Linear Berganda

Melalui perbandingan metode estimasi regresi, yaitu *CEM*, *FEM* serta *REM* (*Random Effect Model*), serta beberapa pengujian seperti uji *Hausman*, *Chow* serta *Lagrange Multiplier* sebagai dasar pemilihan model, diperoleh *FEM* sebagai model regresi linear data panel yang paling sesuai. Hasil dari perhitungannya ditampilkan di tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.170390	0.116220	-1.466101	0.1475
X1	0.008192	0.004067	2.014180	0.0482
X2	0.111749	0.023333	4.789393	0.0000
X3	0.005442	0.002821	1.929243	0.0581
X4	-0.147878	0.018929	-7.812294	0.0000
Effects Specification				

Merujuk dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa hasil dari regresi linier berganda dengan *FEM* diperoleh nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk suatu persamaan, antara lain:

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, didapatkan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Temuan ini mengindikasikan bahwa tanpa kontribusi variabel independen Ukuran Pemerintah Daerah (X1), *Leverage* (X2), Belanja Modal (X3), serta Dana Perimbangan (X4), maka nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah -0,170390.
- 2) Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan (X1) sebanyak 1 satuan akan menaikkan (Y) sebesar 0,008192.
- 3) Temuan ini menjelaskan bahwa jika (X2) bertambah 1 satuan, maka (Y) akan melonjak sebesar 0,111749.

RESEARCH ARTICLE

- 4) Temuan ini memperlihatkan bahwa kenaikan (X3) sebanyak 1 satuan akan meningkatkan (Y) sebesar 0,005442, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Sebaliknya, penurunan (X3) sebanyak 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Kinerja Keuangan sebesar 0,005442.
- 5) Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan (X4) sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan (Y) sebesar 0,147878.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Weighted Statistics			
R-squared	0.925289	Mean dependent var	0.238669
Adjusted R-squared	0.901942	S.D. dependent var	0.186010
S.E. of regression	0.025409	Sum squared resid	0.041320
F-statistic	39.63177	Durbin-Watson stat	2.083836
Prob(F-statistic)	0.000000		

Merujuk dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa nilai R^2 tercatat sebesar 0,901942. Ini menandakan bahwa kombinasi variabel Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan mampu menjelaskan 90,19% variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Sisa 9,81% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam model ini.

4.1.4 Uji Hipotesis

1) Uji t (Parsial)

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat uji t-hitung untuk variabel bebas (*independent*) Ukuran Pemerintah Daerah (X1) sebesar 2,014180 > nilai *t-table* 1,990066 dengan tingkat signifikansi 0,0482 < 0,05, yang berarti variabel (*independent*) Ukuran Pemerintah Daerah (X1) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel (*dependent*) kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji t-hitung untuk variabel bebas (*independent*) *Leverage* (X2) sebesar 4,789393 > nilai *t-table* 1,990066 dengan tingkat signifikansi 0,0000 < 0,05, yang artinya variabel (*independent*) *Leverage* (X2) memengaruhi secara parsial dan signifikan terhadap variabel (*dependent*) kinerja keuangan pemerintah daerah. Koefisien positif ini menandakan bahwa tingginya *leverage* (pembiayaan melalui hutang) justru meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji t-hitung untuk variabel bebas (*independent*) Belanja Modal (X3) sebesar 1,929243 < nilai *t-table* 1,990066 dengan tingkat signifikansi 0,00581 < 0,05, artinya variabel (*independent*) Belanja Modal (X3) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel (*dependent*) kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana uji t-hitung untuk variabel bebas (*independent*) Dana Perimbangan (X4) sebesar -7,812294 < nilai *t-table* 1,990066 dengan tingkat signifikansi 0,0000 < 0,05, artinya variabel (*independent*) Dana Perimbangan (X4) berdampak parsial terhadap variabel (*dependent*) kinerja keuangan pemerintah daerah.

2) Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (*uji-F*) pada Tabel di atas, memperlihatkan bahwa nilai F hitung sebesar 39,63177 > F tabel 2,486, dengan nilai probabilitas 0,000000 yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara bersamaan variabel *independent* Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent*, yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2 Pembahasan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil uji t (parsial), ditemukan nilai t-hitung sebesar 1,929243 yang lebih kecil dari t-tabel 1,990066 dengan tingkat signifikansi 0,0482, yang berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan total aset, semakin baik kinerja keuangannya. Besarnya ukuran pemerintah mendukung kemampuan dalam

RESEARCH ARTICLE

melaksanakan operasional, memenuhi kewajiban, dan memberikan layanan publik, seperti pembangunan infrastruktur. Pendapat ini sejalan dengan Maulina (2021), yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang besar mempermudah penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Meilanda dkk. (2023) dan Kirana & Sulardi (2020), yang menunjukkan pengaruh positif signifikan dari ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan. Temuan ini konsisten dengan teori *stewardship* yang memandang manajer publik sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola aset daerah demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis terhadap *Leverage* menunjukkan pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan. Nilai t-hitung untuk *Leverage* adalah 4,789393, yang melampaui t-tabel 1,990066 dengan tingkat signifikansi $0,0000 < 0,05$, yang artinya *Leverage* berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* atau proporsi kewajiban terhadap ekuitas, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. *Leverage* memperlihatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan pembiayaan utang untuk mendukung operasional, pembangunan, dan pemenuhan kewajiban. Pendapat ini sejalan dengan Sumarjo (dalam Adinata & Efendi, 2022), yang menyatakan bahwa penggunaan utang yang optimal dapat membantu pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dan menambah aset tanpa selalu mengandalkan pendanaan internal. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Riani & Hrp (2022) dan Adinata & Efendi (2023), yang menunjukkan dampak positif dan signifikan dari *leverage* terhadap kinerja keuangan. Meskipun demikian, temuan ini bertentangan dengan studi Julianti dkk. (2024), Putri & Priyadi (2021), dan Sedek & Kusumawati (2024), yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berdampak signifikan. Secara teori, hasil ini mendukung teori *stewardship*, yang memandang pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana, termasuk pembiayaan utang, secara akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengujian terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uji t (parsial), diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,929243 yang lebih kecil dari t-tabel 1,990066 dengan tingkat signifikansi 0,0581, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Modal belum mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena alokasi belanja modal yang lebih banyak diarahkan untuk pengeluaran rutin atau kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Meilanda dkk. (2023) dan Pangestu (2023), yang juga menemukan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Kirana & Sulardi (2020), Maulina & Fahira (2021), dan Ratnasari & Meirini (2023), yang menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selain itu, hasil ini juga tidak sepenuhnya sesuai dengan teori *stewardship*, yang mengasumsikan bahwa pemerintah daerah selalu efisien dalam menggunakan Belanja Modal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketidakefisienan birokrasi, campur tangan politik, rendahnya kapasitas perencanaan, dan penyalahgunaan anggaran sering menghambat Belanja Modal dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan. Pada variabel Dana Perimbangan, hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai t-hitung sebesar -2,903307 lebih besar secara mutlak daripada t-tabel 1,990066 dengan tingkat signifikansi $0,0000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan Dana Perimbangan, semakin menurunkan kinerja keuangan. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada dana pusat, yang mencerminkan rendahnya kemandirian daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan yang tinggi juga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, sehingga berdampak negatif pada efektivitas dan akuntabilitas kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Novita & Arza (2024) dan Pangestu (2023), yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Maulina dkk. (2021), Natalia & Suprpto (2023), dan Riani & Hrp (2022), yang mengungkapkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh variasi dalam pengelolaan dana, tingkat kemandirian fiskal, dan kebijakan alokasi belanja di masing-masing daerah.

RESEARCH ARTICLE

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai F-hitung mencapai 69,40668 yang lebih besar dari F-tabel 2,486, dengan tingkat probabilitas 0,000000 yang lebih rendah dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara bersama-sama variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini diperkuat oleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,901942, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar penelitian ini turut mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya, seperti Maulina & Fahira (2021), Pangestu (2023), Novita & Arza (2024), Riani & Hrp (2022), serta Adinata & Efendi (2022), yang juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara simultan antara Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan temuan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin besar total kepemilikan aset, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyedia layanan publik serta meningkatkan kinerja keuangan. 2) *Leverage* juga berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa manajemen utang yang efektif dapat mendukung pendanaan pembangunan dan operasional pemerintah daerah secara optimal. 3) Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya belanja modal belum diikuti dengan perencanaan dan pengawasan yang optimal, sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan belum signifikan. 4) Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar penerimaan dana perimbangan, semakin tinggi pula ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, yang pada gilirannya mengurangi kemandirian keuangan daerah. 5) Secara simultan, variabel Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas variabel atau faktor lain seperti tingkat kemakmuran dan sistem pengendalian internal. Peneliti juga disarankan untuk menggunakan rasio lain, seperti rasio pertumbuhan, efisiensi, dan aktivitas dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Selain itu, disarankan untuk memperluas lingkup wilayah kajian agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.

6. Referensi

- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2).
- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098-1114.
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584-598.

RESEARCH ARTICLE

- Julianti, H., Agustina, F., & Khoiriyah, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(2), 141-152.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390-399.
- Meilanda, P., Periansya, P., & Armaini, R. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6577-6595.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan (kabupaten/kota di provinsi jawa tengah, tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v15i1.1379>.
- Natalia, N., & Suprpto, W. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2).
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 430-443.
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh pajak daerah, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Ekonomi Keuangan, Investasi dan Syariah*.
- Putri, S., & Priyadi, M. (2021). Pengaruh *leverage*, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Riani, D., & Hrp, J. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, *leverage*, ukuran pemerintahan, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan (JAAPI)*, 3(1).
- Saraswati, D., & Rioni, Y. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, I. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, *leverage*, dana perimbangan, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota Pulau Sumatera). *Jom Fekom*, 3(1).
- Sedek, T. C. B., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh *leverage*, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.